

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Birokrasi adalah sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional-instrumental, yakni mendisain sejumlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Agar terpola secara *ajeg* keseluruhan aktivitas ditata secara baku. Pada tahap proses, keseluruhan aktivitas yang telah ditata dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi.

Temuan data yang menunjukkan bahwa ada persoalan berkaitan dengan tidak tercukupinya kebutuhan personil dan adanya multi tafsir terhadap *jobs description* merupakan kondisi menyimpang dari nilai-nilai birokratisasi.

Birokrasi seperti yang diidealkan oleh Weber sangat sistematis dalam mendisain kebutuhan organisasi dan memroses jalannya aktivitas kerja. Kebutuhan akan SDM dalam pos jabatan dan kejelasan tentang pembagian kerja merupakan dua hal penting dalam birokrasi. Setiap penempatan personil selalu berdasarkan pertimbangan yang rasional berkaitan dengan kebutuhan, begitu juga pemetaan tugas selalu menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi berkaitan dengan kejelasan uraian kerja sehingga setiap aktor mendapat kepastian tugas dan tanggungjawab yang harus ditanganinya.

Kedua hal yang disebutkan di atas tidak terjadi pada Bappeda. Terjadi kekurangan personil pada Sub Bidang Ekososbud. Jumlah yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis jabatan menunjukkan adanya kurang personil. Dalam birokrasi kurang personil akan berkorelasi dengan beban kerja. Setiap personil telah diberikan tugas, apabila ada terjadi kurang personil itu akan berimplikasi terhadap adanya kekosongan peran. Agar peran itu tetap menjalankan fungsinya, secara sendiri tugas dari peran tersebut pada prakteknya akan ditangani oleh personil lain.

Adanya multi tafsir terhadap *jobs description* yang berujung pada terjadinya ketidakjelasan tugas adalah hal yang janggal dalam birokrasi. Sebab kejelasan tugas dan tanggungjawab adalah sesuatu yang menjadi perhatian penting dalam birokrasi.

Kekurangan personil dan adanya multi tafsir terhadap *jobs description* merupakan dua hal yang semstinya tidak terjadi dalam birokrasi, namun pada prakteknya kondisi itu terjadi dalam praktek penanganan program pendidikan inklusi. Kedua hal di atas memberi tanda bahwa telah terjadi kondisi disorganisasi birokrasi dalam penanganan pendidikan inklusi yang berujung pada peralihan tugas.

Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memberlakukan pembagian kerja dalam proses kerjanya. Untuk itu peralihan kerja adalah hal yang tidak dibenarkan. Berdasarkan peraturan, kegiatan Pendidikan Inklusi seharusnya ditangani oleh Sub Bidang Ekososbud karena di dalam *job description*,

aspek/persoalan pendidikan merupakan tupoksi dari Sub Bidang Ekososbud, namun, fakta di lapangan program-kegiatan pendidikan inklusi di tangani oleh Sub Bidang Litbang, bidang yang memiliki peran sebagai suplayer data dalam membuat perencanaan dan bukan sebagai perencana utama..

## **B. Saran**

### **1. Evaluasi terhadap Departemenisasi pada Struktur Organisasi**

Saran yang diberikan terhadap adanya multi tafsir terhadap *jobs description* dalam penanganan program pendidikan inklusi yakni, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dengan cara melakukan spesifikasi departemen yang lebih aplikatif. Dibentuk Sub Bidang Litbang yang khusus melakukan penelitian dan mensupport data bagi Sub Bidang Ekososbud dengan nama Sub Bidang Litbang Ekososbud. Dengan demikian diharapkan ada kejelasan peran dari masing-masing elemen, sehingga dalam mencerna atau mendisain kegiatan kerja sudah diketahui kedudukan tugas dan fungsi dari setiap unit.

### **2. Pengajuan Permohonan Penambahan Pegawai disertai Data yang Aktual dan Akurat.**

Saran yang diberikan untuk persoalan kurang personil adalah melakukan pengajuan permohonan penambahan jumlah personil disertai data yang aktual dan akurat mengenai kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Data Internal seperti analisis Analisis Jabatan merupakan data yang sangat mendukung dan memperkuat alasan perlunya penambahan personil.

### 3. Saran Akademik

- a. Bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang peralihan tugas dan penyebabnya adalah kurangnya SDM dan itu berdampak terhadap beratnya beban kerja, disarankan metode yang dipergunakan adalah kuantitatif dengan analisis statistik, karena berbicara tentang kebutuhan SDM dan relevansinya dengan beban kerja harus mengukurnya secara matematis. Ada indikator yang dipergunakan untuk mengukur keseimbangan antara jumlah personil dengan beban kerja yang ditanggung.
- b. Persoalan peralihan tugas dalam organisasi merupakan masalah yang cukup sensitif. Penulis menemui kesulitan dalam proses pencarian informasi. Informan yang dimintai keterangan cenderung tertutup dalam memberi keterangan berkaitan dengan peralihan kerja karena ini berkaitan dengan nama baik dari sebuah organisasi. Untuk itu saran penulis bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang masalah peralihan tugas, ada baiknya dikaji dengan mempergunakan studi literatur. Dengan melakukan studi literatur, peneliti akan terhindar dari persoalan sensitivitas dalam memperoleh data. Hal itu dikarenakan peneliti tidak lagi mengkaji persoalan yang dialami oleh organisasi tempat pelaksanaan *internship* secara tuntas tetapi hanya menjadikan masalah peralihan kerja sebagai kasus yang akan dikaji secara literatur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Albrow Martin. *Birokrasi*. 2004. Penerjemah; M Rusli Karim dan Totok Daryanto. Tria Wacana. Yogyakarta.

Dahlan Al-Barry dkk. (2003) *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Target Press; Surabaya

Husein Usman, Purnomo Setyadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ismail Masya , et.al . 1978. *Manajemen*, Semarang: Effhar Offset.

Kurniawan Agung. (2009). *Transformasi Birokrasi*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Manullang. 1976. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Galia Indonesia.

Maleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nasir Moh. 1999. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia.

Ritzer George, Goodman Douglas. 2009. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Salusu. J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: Grasindo.

Sinambela Poltak Lijan, 'et al. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sutarto. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upayah Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

**Dokumen:**

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor. 190 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

**Website:**

<http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/361/jiptumpp-gdl-s1-2010-destiyarpr-18019-PENDAHUL-N.pdf> . Diakses pada 16 September 2010

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17922/7/Cover.pdf> . Diakses pada 16 September 2010

<http://www.abhest.co.cc/2010/02/konsep-birokrasi.html>. diakses pada 20 Agustus 2010

<http://digilib.unes.ac.id/gsdi/collect/archives/HASlcaes.dir/docpdf>, diakses 25 Juli 2010.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17922/4/Chapter%20II.pdf> . diakses pada 13, September 2019

<http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASHcdb9.dir/doc.pdf>  
<http://etd.eprints.ums.ac.id/8051/2/B100060105.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17922/4/Chapter%20II.pdf>

[http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/14/Berita\\_Utama\\_-\\_Jatim/krn.20081114.147967.id.html](http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/11/14/Berita_Utama_-_Jatim/krn.20081114.147967.id.html)

<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/30/65722/27-Kelurahan-Masih-Kekurangan-Pegawai>.

Yogyakarta, 5 Oktober 2009

**Script wawancara dengan Dra. Suprantini**  
**(Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi)**

---

- Penulis : Saya mau tanya berkaitan dengan pelaksanaan pembagian kerja. Dulu waktu saya *internship* selama 40 hari di sini saya melihat ada 1 program kerja yaitu pendidikan inklusi. Dalam pelaksanaan program tersebut apakah dibentuk tim khusus untuk menanganinya atau dikerjakan oleh Ekosobud karena berdasarkan *job description* itu tugasnya Ekosobud?
- Informan : Jadi dalam pelaksanaan kita berkerja sehari-hari itu ada yg namanya urusan kemudian program baru kegiatan. Urusan, ini di *breakdown* ke dalam beberapa program, program ini di *breakdown* ke beberapa kegiatan. Urusan ditangani oleh masing-masing SKPD terkait, misalnya urusan pendidikan itu ada di Dinas Pendidikan, kalau di Bappeda itu urusan perencanaan pembangunan daerah, nah itu programnya ada 5 kalau di tahun 2007-2008 kemarin itu ada lima program. Ini nanti coba di lihat di Renstra ini ada data-data. Masing-masing program ini ada kegiatan. Misalnya program 1 ada sekian kegiatan sampai dengan nanti program ke 5 ini program pengendalian dan evaluasi ini program ke 5. ini nanti ada juga beberapa kegiatan. Nah untuk kemarin yang dicontohkan program pendidikan inklusi itu dimasukkan ke program Litbang. Nanti kan ada 5 program salah satunya program penelitian dan pengembangan. Kegiatannya sama yaitu penelitian dan pengembangan, Nama programnya sama salah satu dari kegiatannya keluarannya adalah penyusunan Perwal pendidikan inklusi, nah dalam pelaksanaan kegiatan ini kita memerlukan berbagai tim tergantung tim itu dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan yg melibatkan pihak ketiga. Jadi konsultasi yang dikerjakan oleh pihak ketiga Jadi kegiatan yg berkerjasama dengan pihak ketiga, pihak ketiga dalam hal ini konsultan. Ini dibentuk 2 tim ada tim pengawas dan tim pengadaan. Kegiatan yg berkaitan dengan suakelola, itu dalam hal ini dikerjakan sendiri oleh kita, itu dibentuk tim, nah tim ini sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau yg dengan pihak ketiga itu hanya ada 2 tim yaitu tim pengadaan itu kalau di Bappeda lho tim pengadaan dan tim pengawasan. Tim pengadaan yang mengadakan konsultan dan tim pengawas ini yang akan mengawasi apa yang dikerjakan oleh konsultan. Tetapi kalau kegiatan yang kita kita tergantung pada....misalnya kita menyusun RKPD. Itu kita suakelola jadi disana ada tim penyusun RKPD kita menyusuna KUAPPA kebijakan untuk anggaran prioritas platform anggaran misalnya ada tim itu. Seperti itu.
- Penulis : O,...berarti selama ini pemikiran saya keliru/salah. Saya kira misalnya pendidikan inklusi, kalau di *job desc* itu punya Ekosobud

- jadi itu ditangani oleh orang-orang di Ekosobud ternyata ga seperti itu,
- Informan : *Nggak. Nggak* jadi dibentuk tim, itupun dari intern kita maupun dari instansi terkait misalnya pendidikan inklusi ya dari dinas pendidikan. Dari ya SKPD terkait mungkin dari dewan kebudayaan.
- Penulis : Tetapi dari dalam Bappeda sendiri itu orang-orang dari Ekosobud ataukah,,
- Informan : Terkait juga misalnya, karena inklusi itu mungkin nanti juga melibatkan pada perencanaannya seperti apa jadi kita ada Sub Ekosobud, Sub Bid Perencanaan juga jadi terkait disini juga.
- Penulis : Soalnya kemarin saya lihat yang di pendidikan inklusi itu orang-orang di dalmmnya itu dari Litbang.
- Informan : Iya Itu tetapi di Bappeda terkait juga ada mungkin kemarin Kabag Tu-nya Kabag Perencanaan masuk juga masuk.
- Penulis : Okay-okay trus pertanyaan lagi ya. Ini berkaitan dengan kuantitas jumlah dulu waktu 2007 itu saya disini tujumlah personil di pada Ekosobud kalau gak salah cuman 4 yaitu pak Bas...
- Informan : Sub Bid Ekosobud iya, perencanaa atau bagiannya?
- Penulis : Perencanaan dan program
- Informan : Ya itu ada Mas Baskara dan kemudian stafnya kalau tidak salah?
- Penulis : Ada 2 aja. Itu sebenarnya mengalami ada masalah atau gak dengan jumlah kuantitas yang sedikit itu.
- Informan : Ya sebetulnya sesuai dengan Anjab kita dengan personil seperti itu kita masih kurang, karena dengan Analisa Jabatan personilnya paling kurang 72,
- Penulis : Sementara yg ada cuman 40 sekian waktu itu
- Informan : 42 waktu itu. Sekarang 46 kita ditambah ada PNS 4.
- Penulis : Jadi secara kuantitas masih kurang
- Informan : Itu secara kuantias dibuktikan dengan hasil anlisa jabatan.
- Penulis : Terima kasih ya mbak atas beberapa keterangan itu
- Informan : Iya, nanti misalnya dalam menyusun nanti mangalami kesulitan nanya nanti saya arahkan ini yg dipakai atau itu
- Penulis : Okay... matur nuwun mabk atas waktu dan penejelasannya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2009

**Script wawancara dengan Pak Sugito Raharjo, M.Hum (Kasubid Litbang)  
dan Pak Eddy, SE (Kasubid Data)**

---

- Penulis : Pendidikan inklusi bisa dikatakan sebuah program lintas SKPD. Artinya ada beberapa SKPD berkoordinasi di dalam program tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah dari dalam Bappeda sendiri bidang atau sub bidang yang berkompeten atau memiliki tugas menangani program pendidikan inklusi itu bidang apa? Apakah Eksosbud karena berdasarkan *jobs description* pada Parwal No 190 tahun 2005 urusan pendidikan ditangani oleh Ekosobud. Ataukah dibentuk sebuah tim khusus?
- Informan 1 : Yang mengonsep aturan untuk pendidikan inklusi itu eee...ditangani oleh Sub Bidang Litbang, waktu itu Bidang Data dan Litbang kita konsep apa., regulasi kita istilah yang mendara regulasi, regulasi mengenai pendidikan inklusi itu di bidang litbang. Setelah kita godok, kita matangkan itu jadi peraturan walikota. itu regulasinya. Itu implementasinya dari Perwal itu diampuh tupoksi oleh Dinas Pendidikan.
- Penulis : Jadi pelaksanaan praktisnya di lapangan ditangani oleh Dinas Pendidikan
- Informan 2 : Betul...
- Informan 1 : Jadi aaa apa
- Informan 1 : Kita kan penelitian itu
- Penulis : O, jadi sebelum itu ada penelitian
- Informan 1 : Penelitian atau kajian akademis gitu loh....
- Informan 2 : Sudah punya belum pak Fendi?
- Informan 1 : Terkait dengan itu pokoknya keluar golnya kita keluar Perwal. Perwal itu Peraturan Walikota. Itu panyung hukum untuk menindaklanjuti pendidikan inklusi. setelah itu ditindak lanjuti oleh Tupokdi dinas pendidikan
- Penulis : Terus dalam pelaksanaan FGD, *Focus Group Discations* itu difasilitasi oleh....
- Informan 1 : Bappeda
- Informan 2 : untuk mewujudkan jadi regulasi itu, Pak Fendi belunm punya to itu?
- Penulis : Perwalnya aq udah ada, ini ke lebih atas lagi yaitu, kalau saya lihat di *job description*, awalnya saya kira program pendidikan inklusi ini job-nya atau Tupoksinya Sub Bidang Ekosobud
- Informan 1 : Bukan...jadi Tupoksi Litbang itu bisa meneliti atau mengkaji hal-hal yang dianggap strategis.
- Informan 2 : O, *nggak* jadi gini awalnya Bappeda setelah itu Dinas Pendidikan, itu bisa terjadi di Ekosobud ya artinya pengawasan untuk pemantauan, apa
- Informan 1 : Monitoring...

Informan 2 : Kan bidang Litbang ada pengendalian Evaluasi Ekosobud, bisa soal budaya....setelah dari sana....

Informan 1 : *Nggak....nggak...*

Penulis : Sejak awal saya kira pendidikan inklusi...

Informan 2 : O, sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan gitu...

Penulis : Iya, tetapi bukan....awalnya saya kira di Bappeda pendidikan inklusi ini, program ini ditangani oleh Ekosobud karena saya lihat di job des, itu kan aja juga mengani persoalan pendidikan, tetapi ternyata ga ya...

Informan 1 : *Nggak...*jadi bidang Litbang itu menangani hal yg sifatnya strategis terkait dengan isu-isu strategis untuk melakukan penelitian dan pengembangan salah satunya waktu itu muncul pendidikan inklusi. Nanti muncul apa lagi kalau sudah berubah kalau udah goal ya itu dilempar ke dinas teknis. Misalnya tata ruang atau apa Rencana Hijau Kota RHK. Itu juga kita godok disini ya setelah itu dinas teknis yang melakukan aplikasinya dilapangan, dinas lingkungan hidup.

Informan 2 : Kita istilahnya membidani, heheh membidani itu apa... istilahnya apa mengawali dari keseluruhan itu

Informan 1 : Mewujudkan isu kita tangkap wujudkan jadi regulasi udah pelaksanaan dinas terkait. Kita *nggak* boleh melaksanakan,.

Penulis : Kita mengkoordinir aja bappeda

Informan 1 : Sifatnya memang mengkoordinir aja

Informan 2 : Tapi untuk pembagian di Bappeda sendiri tadi yang di Ekosobud itu , ya sepintas memang setelah sana *nggak* secara langsung, itu memang penugasannya dari pendidikan tadi itu pak ya itu memang pendidikan, sosial juga iya, ekonomi ya iya, jadi pendidikan setelah disana penugasan bidang pengendalian ekosobud

Informan 1 : Trus apa lagi?

Penulis : Jalan ceritanya sederhana gimana sampai tiba-tiba Litbang yang tangani tugas pendidikan inklusi

Informan 1 : Ya Tupoksi pengembangan

Informan 2 : Ya isu strategis tadi tadi itu lho...ditangkap Tupoksi bidang penelitian

Penulis : Yang kemudian ditangkap tupoksi Litbang penelitian

Informan 2 : Seperti hijau kota. Itu isu strategis kita tangkap kita buat regulasi untuk jadi Perwal. Nanti badan lingkungan hidup yang menanganinya. Trus apa lagi yang sekarang pengembangan pariwisata

Penulis : e,,RIPP ya?

Informan 2 : Nanti itu jugakan di Dinas Pariwisata. Pokoknya Bappeda itu awal dari awal

Informan 1 : Mengawali...

Penulis : Yang merencanakan gitu

Informan 1 : Dulu Taman Pintar. Itu awalnya isu strategis juga...dari belum ada apa-apa menjadi apa-apa. Setelah jadi ya udah ditangani sendiri

Penulis : Sekarang Bu Erni disana ya jadi Kasei Humas

Informan 1 : Giamana, apa lagi?

Penulis : Ini kan *internship* kemarin , bisa dikatan itu saya proses belajar mencari tahu bagaimana cara kerja birokrasi pemerintahan, biar ntar kalau saya masuk saya nggak blank-blank amat gitu...

Informan 2 : Betul

Penulis : Jadi itu misalnya dalam satu sub bidang itu kan ada terdapat beberapa orang personil/staf. Itu memang sudah ada pemetaan tugas bahwa misalnya bapak A mengerjakan tugas ini pak B menangani tugas itu, ataukah terjadi secara fleksibel saja. Misalnya misalnya pak A mengerjakan ini

Informan 2 : Misalnya Pa Gito membidani Ka Subidang Litabang misalnya anak buah e ada dua. Biasanya ada yang langsung menjurus ke teknis maksudnya stafnya to anak buahnya

Informan 1 : ya secara komandonya, ya khusus menangani itu. Misalnya, saya penelitian stafnya dua ya secara komandonya mengerjakan mengenai penelitian. Tetapi tidak menutup kemungkinan menangani yang lain juga.

Informan 2 : Dipenjabaran Tupoksi kan tidak menutup kemungkinan, menangani yang lain karna tugas-tuas yg lain

Informan 1 : Tetapi implementasinya ya pokonya ada garapan ya ayo dikerjakan bareng-bareng, gak ah bukan bidang saya, nggak mau nangani nggak kerja sama-sama

Informan 2 : Jadi prinsipnya agak fleksibel...bukan berarti kerja sendiri-sendiri. Prinsip *anu* istilahnya kita kerja sama kerja tim apa... *team work* lah

Penulis : *team work* lah dalam bekerja

Penulis : Secara kuantitas kemarin saya ngomong dengan mbak Suprantini di bawah tu, kan Bappeda pada 2007-2008 jumlah personilnya 42 orang ya kalau tidak salah. Secara kuantitas kurang itu dilihat dari analisi jabatan seharusnya 70 sekian. Itu memang kurang ya

Informan 2 : Iya kurang!

Penulis : Kenapa tidak ditambahkan saja atau mekanisme penambahan pegawai seperti apa?

Informan 2 : Nah ini, penambahan pegawai ini yang sulit, secara birokrasi kita ya sudah mengusulkan, kan tidak boleh mengadakan/menambah sendiri. Toh itu harus lewat BKD, ya lewat BKD. Kan tidak hanya Bappeda saja yang mengalami itu. Ada penambahan tetapi bertahap gitu. Kemarin kita dapat empat ya pa ya.

Informan 1 : Iya 4

Penulis : Jadi ada penambahan.

Informan 2 : Iya dapat tambahan empat dari penerimaan PNS yang kemarin itu

Penulis : Nie teman saya mau ikut

Informan 2 : Ya ikut aja mudah-mudahan bisa masuk. Akhir oktober ini kan ada. nggak harus mempergunakan KTP jogja juga bisa, tidak harus KTP Jogja. Saya kira Fendi sudah lulus trus daftar sini

Penulis : Ha..ha...nie belum lulus karena terlalu banyak santai, akhirnya kuliah nggak fokus...keterangan yang saya butuhkan sudah saya peroleh jadi matur nuwun pak

**Keterangan**

Informan 1: Pak Gito

Informan 2: Pak Eddy



Yogyakarta, 15 Desember 2009

**Script wawancara dengan Pak. Drs. Djanjang, M.Si**  
**(Ka Bid Data dan Litbang, sewaktu diwawancarai sebagai**  
**Sekretaris Bappeda)**

---

- Penulis : Berdasarkan Restra tahun 2008 itu , Bappeda memiliki 5 program kerja yang kemudian di *break down* ke dalam beberapa kegiatan, begitu ya pak, ya. Salah satunya adalah pendidikan inklusi. kalau tidak salah. yang ingin saya tanyakan, itu awal mula adanya ide untuk melaksanakan perogram pendidikan inklusi itu dari mana?
- Informan : Dulu itu kan lewat penelitian Jarlit (Jaringan Penelitian). Jarlit teliti, emm, saya waktu itu belum pindah ke sini, jadi saya belum bisa ceritakan banyak. Jarlit salah satu judulnya itu. di dokumen kelihatannya ada. coba dilihat di pak Gito, apakah pernah salah satu peneliti Jarlit memeliti itu. tapi seingat saya itu kalau pak Hajar cerita, Jarlit dulunya itu mengkaji salah satu dari itu. jd awal idenya dari sana.
- Penulis : Ou, jadi dari Jarlit, kemudian di respon/tangkap oleh Bappeda begitu ya Pak?
- Informan : Oleh Pemkot waktu itu, yang di motori oleh teman-teman dari...dari LSM tuna netra, Tria Manunggal. Itu Pak Setyo itu sangat, sangat apa ya, sangat punya keinginan bahwa ada satu Perwal yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan Inklusi di Kota.
- Penulis : Berarti awalnya isu itu dari Jarlit,
- Informan : Jarlit, Di awal oleh Bappeda dan LSM Tria Manunggal
- Penulis : Sampai akhirnya di godok jadi Perwal ya pak kalau tidak salah Perwal no 47 Tahun 2008
- Informan : Terus secara intensif diangkat menjadi persiapan pelaksanaan pendidikan inklusi. Kemudian sekarang kelihatannya sudah jalan apa belum ya nanti dicek dibuktikan?
- Penulis : Kalau Perwalnya sudah ada saya sudah lihat
- Informan : Pelaksanaan artinya, fasilitasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah diserahkan kepada dinas pendidikan.
- Penulis : Dinas Pendidikan sebagai yang mengimplementasikannya. Iya yang punya
- Informan : Tupoksi untuk itu, pelaksanaanya ada disana
- Penulis : Kalau secara internal Bappeda sendiri Pak, Program Pendidikan Inklusi ini di tangani oleh satu Bidang/ atau di bentuk sebuah team work untuk itu.
- Informan : Bappeda itu tim, tim
- Penulis : Ow, secara internal sendiri di bentuk tim
- Informan : Tim lintas itu yang melibatkan orang-orang di luar Bappeda,
- Penulis : Jadi internal Bappeda sendiri juga tim? Jadi misalnya dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan inklusi ada...

- Informan : Tidak, penyiapan, penyiapan pelaksanaa program pendidikan inklusi, layak atau tidaknya, sehingga ada Perwal. tugas Bappeda hanya sampai situ. tugasnya mengkoordinasikan teman-teman yang terkait untuk bagaimana memersipakan program layanan pendidikan inklusi. sampai disitu Bappeda, menyiapkan, setelah itu ya di lemparkan kepada SKPD terkait yang punya Tupoksi.
- Penulis : O, berarti pendidikan inklusi ini, kalau di internal Beppeda sendiri di tangani atau jobnya Litbang?
- Informan : Ada tim, ada tim di di Litbang, yang menyiapkan.
- Penulis : Berarti bisa dikatakan jobnya Litbang waktu untuk menangani...
- Informan : Ya waktu itu Litbang yang menangani. Untuk menangani...ya pengembangan bidang pendidikan. Menggali....menggali yang tadinya belum ada kemudian menjadi ada itu kan pengembangan.
- Penulis : Berarti di Litbang, bukan dibentuk Tim work misalnya ada dari Ekosobud, ada dari..
- Informan : Saya ga hafal itu, tapi jelas melibatkan instansi misalnya pendidikan sendiri, dinas sosial terkait dengan pelayanan penyandang cacat, kemudian organisasi ada kesiapan kelembagaan, kemudian dinas bangunan terkatit dengan saran prasarananya.
- Penulis : Terus dalam pelaksanaan Musrenbang, itu lagi-lagi secara internal Bappeda itu ditangani oleh satu bidang atau di bentuk lagi sebuah tim
- Informan : Ini keluar ya, inklusi sama Musrenbang lain, kalau Musrenbang ini tim.
- Penulis : Tim ya
- Informan : Kalau musrenbang itu Tim. ada SK nya. bidangnya di Bappeda. tapi yang urus semuanya secara Administrasi di bidang perencanaan dan program.
- Penulis : Berarti yang tadi yang penelitian dengan Jarlit, itu bekerja sama dengan Bidang data peneltian dan pengembangan.
- Informan : Jarlit itu Independen ya. Bidang Litbang memfasilitasi atau memberikan dukungan kepada jaringan kerja itu karena dia lembaga mitra kerja pemerintah daerah.
- Penulis : Apakah dalam pelasaan semua program diawali dengan penelitian ya pak, bisa dikatakan gitu?
- Informan : Yang mana?
- Penulis : Misalnya kalau yang di Restra ada yang soal...
- Informan : Nggak mesti! tergantung permasalahannya. Itu harus dispesifikasi dulu apakah lewat satu penelitian, ataukah administrasi layanan. Idealnya semuanya penelitian beda-beda. Ada yang meneliti mendalam atau hanya observasi.
- Penulis : Trus ini berkaitan dengan pola hubungan kerja ya pak. inii saya melihat ada bidang perencanaan dan program kemudian bidang evaluasi dan peleopran, itu ada katakanlah korelasi secara fungsional antar setiap bidang. Ya pak
- Informan : Iya...

- Penulis : Jadi misalnya bidang data dan Litbang melakukan penelitian, setelah datanya di peroleh diberikan kepada bidang perencanaan dan program trus. oh gitu ya pak, memang ada korelasi
- Informan : Iya, bidang di luar memberikan suporting ya, karena perencanaan itu membutuhkan adanya informasi dan data. bagian informasi tentang pengembangan dan penelitian itu bidang Litbang itukan kaitan dengan data dan statistik.
- Penulis : Okay pak yang saya ingin cuman itu saja, secara internal Bappeda di bentuk tim atau diserahkan kepada satu bidang, ternyata di bentuk tim ya pa untuk menangani itu
- Informan : Ya tim, namun secara administrasi tanggung jawabnya bidang Litbang. pelaksanaan kegiatannya melibatkan orang lain dan itu di bentuk dalam satu tim. bisa dari Bappeda, bisa di luar Bappeda, bisa pemerintah, pegawai negeri dan luar pemerintah juga bisa.
- Penulis : Paling ngga keterangan ini bisa menjadi kerangka berpikir bagi saya untuk bisa mulai menulis...matur nuwun ya Pak.
- Informan : Iya,

Yogyakarta, 07 Mei 2010

**Script wawancara dengan Drs. Baskara, M.Si  
(Ka Sub Bid Ekososbud)**

---

- Penulis : Dalam laporan KTI saya, saya mau melihat mengenai manajemen pembagian kerja yang ada di Bappeda , jadi berdasarkan Perwal 190 tahun 2005 yang kemudian sudah direvisi jadi Perwal 61 tahun 2008.
- Informan : Anu Perwal kota ya?
- Penulis : Iya tentang perincian pembagian tugas dan fungsi antar satuan kerja di Bappeda. Itukan setiap satuan unit sudah diserahkan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak sekarang masih di Eksosbud apa sudah pindahkan ya?
- Informan : Sekarang saya sudah dipengendalian, ou dulu itu saya masih diprencanaan saya.
- Penulis : jadi waktu saya di sini itu, Perwal yang masih dipakai adalah Perwal No. 190 tahun 2005 tentang penjabaran tugas dan fungsi pada setiap satuan unit kerja. Di situ kalau tidak salah pada Ekososbud ini....
- Informan : Ini sekarang sudah ada peraturan Walikotanya,,
- Penulis : Yang No. 61 itu ya Pak jadi ini sudah direvisikan, jadi yang 190 sudah diganti dengan 61. Tapi yang saya jadikan sebagai patokan adalah tahun 2005. Pada saat itu saya melihat pada Sub Bidang Ekososbud dilimpahkan tugas dan tanggung jawab yang bisa saya katakan cukup luas, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, seni budaya, pendidikan, keamanan, ketertiban, pariwisata, tenaga kerja, pariwisata, transmigrasi, agama pemberdayaan masyarakat sampai pada persoalan gender ditangani atau menjadi wilayah kerja Ekososbud gitu ya pak ya. Itu kalau menurut saya cukup luas...
- Informan : Iya cukup luas...
- Penulis : Kalau menurut bapak gimana wilayah kerja yang diserahkan ke Eksosbud cukup luas juga atau tidak, soalnya banyak hal yang ditangani kususnya oleh Sub bidang Ekososbud ini.
- Informan : Yang pertama anu menangani dua bidang mas yaitu Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dan Bidang Perencanaan Ekososbud. Ya bidang kerja Ekososbud seperti tadi, menangani segala sesesuatu yang berkaitan dengan masalah perdagangan, kesehatan, pendidikan, kesra, kemasyarakatan ya itu di wilayahnya Ekososbud jadi cukup luas. Kita mengerjakannya dari dalam nanti. E,,,ini apa mengawal perencanaan dari Musrenbang kota juga ikutin di Propenas sampai ke Bapenas.
- Penulis : Sampai ke situ...terus saya melihat implikasi dari apa namanya pelimpahan tugas dan fungsi Ekososbud yang cukup luas itu, itu saya melihat implikasinya ke volume kerja. Kira-kira ada implikasinya gak seperti akhirnya volume kerjanya banyak gitu?

Informan : O, banyak mas, banyak satu.... sisi sisi yang lain mengikuti kegiatan-kegiatan mengawal SKPD-SKPD atau patner dan juga dengan dewan

Penulis : Jadi menurut bapak ya, ini tadi kan saya bilang tugas yang diserahkan ke Ekososbud cukup banyak dan cukup luas. Kemudian pastinya itu berdampak terhadap volume kerja

Informan : Ou, ya itu volume kerja...

Penulis : Saya lihat di Renstra SKPD, kalau tidak salah di Renstra SKPD 2007-2011, 5 tahun ya, Itu kegiatan yang ditangani oleh Ekososbud jika di dibandingkan atau komper dengan sub bidang lain masih lebih banyak Ekososbud, jadi kalau saya tidak salah ada 7 kegiatan 2 diantaranya dikerjakan sendiri yaitu RIPP dan...apa

Informan : Ou, waktu itu *panjenengan flash back* ke belakang RIPP itu, ow waktu itu to? *Ta eling-eling* dulu mas. RIPP itu dikonsultasikan dipihak tigakan jadi dokumennya sudah ada.

Penulis : Tapi itu ditangani oleh Ekososbud ya.

Informan : Iya, waktu itu Pimpronnya saya. Dana Rencana Induk Pengolahan Pariwisata

Penulis : Bapak waktu itu sebagai kepala bagian di Eksosbud ya,

Informan : Kasubbid.

Penulis : Iya Kepala Sub Bidang, waktu itu dengan jumlah staf yang hanya 2 orang jadi bapak dan ada 2 orang staf, itu menurut bapak dengan jumlah personil hanya 3 orang kemudian menangani volume kerja yang cukup banyak itu apa namanya ada semacam.....

Informan : *Anu* mas *over loud*, beban kerjanya terlalu berat sehingga kita anu mas apa e..waktu itu kekurangan staf dalam membantu kita membantu dalam anu... apa membuat perencanaan program termasuk tugas-tugas rutin

Penulis : Jadi bisa saya katakan..

Informan : Minimal 3 mas

Penulis : Tapi jumlah 3 pun tidak sesuai dengan volume atau beban kerja, begitu ya pak?

Informan : Iya tapi saat ini sudah ada tambahan pegawai baru lagi. Disini sudah 3

Penulis : Sudah tiga ya pak ya?

Informan : Iya sudah 3

Penulis : Jadi sederhananya bisa saya katakan bahwa jumlah tenaga kerja yang hanya waktu itu 3 orang

Informan : 2 waktu itu mas. iya 2 orang sesuai dengan volume atau jumlah kegiatan yang banyak memang Eksosbud mengalami kesulitan dalam kegiatan kerja.... sehingga kemarin kita melaporkan kepada Baspenda rincina program sehingga kita di tambahi dari BKD..

Penulis : Akhirnya sudah ditambahkan ya...dulu waktu saya disini, saya malah sering di Litbang ya pak ya, waktu itu ada satu *issue* yang kemudian ditangkap oleh Litbang yaitu *issue* tentang pendidikan

inklusi, itu kemudian menjadi apa namanya kegiatan dari Sub Bidang Litbang. Itu memang job-nya Litbang ya pak.?

Informan : Iya betul, kan ada hibah penelitian dan salah satu penelitiannya tentang pendidikan inklusi jadi tugasnya melakukan penelitian. Itu mas Affrio yang tangani.

Penulis : iya Pak. Affrio, Bu Erni yang tangani...Bu, Erni sudah pindah ke Taman Pintar ya? Saya pernah ketemu sama beliau

Informan : o, ya.

Penulis : saya pikir pendidikan Inklusi ini masuk dalam wilayah kerja Ekosobud. Soalnya di Perwal tugas Ekosobud juga kan menangani soal pendidikan jadi kemarin *issue* soal pendidikan inklusi ditangani oleh Ekosobud ternyata malah Litbang yang tangani ya...?

Informan : Iya. Karna rintisan waktu itu mas, rintisan awalnya-awalnya di Litbang namanya penelitian dan pengembangan, jadi tarafnya-taraf rintisan.

Penulis : O, jadi yang rintis Litbang maka dari itu yang menanganinya Litbang.

Informan : Itu kan hasil dari penelitian mas. Trus dirintis disitu nanti saat itu posisinya sekarang di SKPD Dinas Pendidikan.

Penulis : SKPD, soal pendidikan inklusi itu ya. Itu di godok jadi Raperwal apa langsung Perwal ya pak?

Informan : Raperwal dulu, kalau soal pendidikan inklusi nanti tolong sama mas Affrio, saya kurang begitu paham.

Penulis : Okay, berarti pemahaman saya keliru, saya pikir pendidikan inklusi, adalah persoalan pendidikan jadi harus ditangani oleh Ekosobud tetapi ternyata di tangani oleh Litbang

Informan : Nuansa sekarang juga sangat berbeda lagi mas di Bappeda, dengan sekarang Sub Bidang hanya dua, yang perencanaan sub bid nya 2, Mas Fais sama Mbak, Nani. Dulu kan 3

Penulis : Berarti sudah banyak ya yang dirubah struktur organisasinya

Informan : Sub Bid-nya 2 tetapi tambah satu lagi Bidang Data

Penulis : Okay Pak. Untuk sementara ini keterangan yang saya peroleh dari bapak bisa saya pergunakan untuk menyusun

Informan : Nanti persoalan pendidikan inklusi hubungi Mas. Affrio di Litbang

Penulis : Iya nanti saya coba kalau masih kurang.

Informan : *Wes tak* bantu

Penulis : Matur nuwun ya pak sudah meluangkan waktu untuk saya.

Informan : Kalau sekarang disini berdebat soal masalah pengendalian. Pengendalian kan disini tetapi di Dalbang juga ada bidang pengendalian. Dari sana khususnya pengendalian tetapi pengendalian dari sisi semacam penelitian kegiatan, kalau disini bidang program berarti di atas kegiatan itu masih ada *out come*.

Penulis : Berarti persoalannya mungkin semacam ada tumpang tindih ya Pak?

Informan : Iya, tumpang tindih dan duplikasi

Penulis : Ada kesamaan apa...tugas

Informan : Di sini juga kan ada pengendalian, ada bagian pengendalian pembangunan, ada pengendalian anggaran, ada pengendalian pengawasan dan inspektorat ada lagi pengendalian Tupoksi bagian organisasi. Ada lima itu yang saling berkaitan. Sebenarnya kegiatan di Dalbang itu lebih kecil, lebih teknis. Sementara bidang ini melihat dampak. disini lebih luas.....contohnya kita buat gedung SD, dari tidak ada menjadi ada itu kewenangannya Dalbang ikut mengawal dari tata kelolanya, gedungnya sampai selesai kontrak itu wilayahnya Dalbang, tetapi kalau Bappeda lebih melihat udah berjalan belum, bagaimana dengan gurunya, muridnya, sarana dan prasaranya, sampai terjadinya proses belajar mengajar. Jadi dari awal sampai selesai.

Penulis : Saya sempat ngomong sama mbak. Prantini mengenai apa namanya, perincian tugas urusan kerja. Jadi di wilayah kantor walikota itu ada yang namanya urusan, urusan ditangani oleh setiap instansi yang kemudian di *breakdown* ke dalam program dan kemudian di *breakdown* kedalam kegiatan. Itu apa namanya, mbak. Prantini sempat bilang kalau ada tim pengawas dan tim konsultan, tim pengawas, itu maksudnya apa ya pak. Itu berasal dari Bappeda sendiri atau?

Informan : Tim pengawas yang dari siapa ya mas?

Penulis : Jadi apa namanya ada suatu kegiatan

Informan : O, itu... tim pengawasan dan tim bimbingan, itu dari Dalbang. Misalnya satu kegiatan bulan 6, ko belum laporan, ada apa, perkembangannya sampai mana, penyerapan dana sudah terpakai apa belum

Penulis : Pengawasan itu ya

Informan : Iya pengawasan kegiatan

Penulis : O, sama tim pengadaan *sorry*

Informan : Iya, pengadaan ada lagi, seblum dipihak tigakan kan ada pengadaan. Kalau pengadaan di atas 100.000.000, e,,,50.000.000 harus ada penunjukan kalau di atas ada pemilihan langsung minimal 3 konsultan yang membanding itu contohnya dalam pengadaan barang-jasa. Tenaga jasa konsultan dan pengadaan barang-barang itu harus ada pembandingnya. Misalnya memberi komputer disini, spek-nya begini

Penulis : Bapak bisa bercerita sedikit ke saya tetang bagaimana suatu kegiatan bisa dijadikan sebagai program kerja suatu bidang. Contoh ada pengembangan pelestarian kawasan budaya, itu ceritanya gimana sampai akhirnya atau ujungnya ditangani oleh Ekososbud sebagai sebuah kegiatan.

Informan : Ekososbud, pelstarian kawasan budaya??

Penulis : O, itu sarana dan Prasarana ya?

Informan : Iya, contohnya RIPP ya

Penulis : Iya RIPP.  
Informan : Rencana Induk Pengembangan pariwisata. Itu kita sudah punya rencana induk tapi kan waktu itu e,,,Perwalnya apa masalah berlakunya sudah habis kan 5 tahun, trus selama 5 tahun itu,,, itu kita harus mereview atau mengkaji kembali apakah RIPP itu masih sesuai dengan kondisi sekarang. Karena pengembangan kawasan budaya itu cepat mas. Pengembangan kawasan Umbulharjo, pengembangan kawasan cepat bagai utara sangat cepat. A, rencana induk harus perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, sehingga ada kegiatan rencana induk pengembangan pariwisata review mengkaji ulang.

Penulis : Itu mengkaji ulang ya pak ya?  
Informan : Iya mengkaji ulang, karena sebagai dasar acuan sebagai pengembangan pariwisata, termasuk sisi tata ruang dan sistem destinasinya

Penulis : Terakhir ini saya lihat ada pembangunan relokasi pasar Ngasem ya, ke jalan Bantul  
Informan : Itu sebenarnya program Propinsi, tetapi lokasinya di kota mas,  
Penulis : Akhirnya di tangani oleh Kota  
Informan : Bukan, itu dananya dari Propinsi. Itu di awali oleh studi-studi, dari studi aspek pariwisata, studi aspek apa,,,pasar, dari stusi hasil budaya, dari studi...(kurang jelas), studi dari hasil pengembangan ekonomi lokal, terutama wisata taman sari sebagai pendukung e,,,kawasan kraton. Kebetulan saya jadi ketua untuk menangani relokasi Pasti apa, pasar satua dan tanaman hias

Penulis : O, pak. Bas yang juga ikut menangani  
Informan : Iya dengan Pak. Hari, kebetulan kita ditugasi untuk merelokasi itu, ternyata sudah sukses to, ternyata sudah di relokasi di pasar Pasti Donggelan. Posisi sekarang, itu disitu ada pasar besok rencana ada tiga pasar, pertama pasar kuliner, pasar cenderamata dan, tapi dikemas dengan struktur arsitektur yang tradisional

Penulis : Wah mantap  
Informan : Nanti ada yang namanya night live, kehidupan malam seperti didepan BI itu kantor Pos, nanti disorot dari sebelah utara itu ada apa namanya pulau Cemeti. Cemeti itu peninggalan dulu, bangunan yang atas itu lho. Jadi harapannya nanti pasar itu pengunjungnya ketika masuk langsung berbelanja. Kebetulan disitu ada komunitas pengrajin batik

Penulis : Memanfaatkan kearifan lokal yang ada disana itu juga ya..  
Informan : Iya betul-betul, ditampung sehingga diharapkan mendukung wisata taman sari, jadi dalam rangka penataan pasar.

Penulis : Okay pak. Kayanya keterangan yang saya peroleh untuk sementara sudah cukup, nanti coba saya kembangkan  
Informan : Sekrang kita baru menangani pasar Ngasem, pasar Terban  
Penulis : Tapi itu kalau misalnya di Bappeda sendiri unit apa yang menangani

- Informan : Itu dari aspek sosialnya saja, nek aspek tata ruang, aspek fisik kita koleborasi
- Penulis : berarti secara internal bappeda ada semacam dibentuk tim untuk
- Informan : Iya betul, aspek sosial melihat bagaimana misalnya mengelola pendagangnya, trus modal yang dibutuhkan berapa, kita sesuaikan dengan kabutuhan pedagang yang ada di lokasi. Kita mengamankan alun-alun utara dulu, kan liar, harapannya bisa ditampung di pasar. Trus nanti pengembangan terminal Giwangan juga ikut terminal Ngabean itu juga turut mendukung kawasan keraton, nanti dibuat satel tempat parkir selain di senopati dan hotel garuda
- Penulis : Berarti saling mendukung semua ya
- Informan : Jadi nanti di Ngabean itu pakai sattel mas, disekitar alun-alun utara-selatan. Sattel yang bukan itu, setiap hari parkir bis disitu kita bisa punya sarter-serter di kawasan wisata seperti alun-alun dan utara-selatan, sebagai pendukung aja.
- Penulis : Okay berarti benar-benar Jogja mau di disaint menjadi kota pariwisata
- Informan : Memang ikon atau modal dasarnya kan kita pariwisata yang berbudaya. Keunggulan kita sebagai lokomotif pembangunan, pariwisata dan pendidikan itu modal dasar. Jadi sebagi kota pendidikan dan kota pariwisata itu menjadi ikon penggerak lokomotif ekonomi di kota Jogja
- Penulis : Iya pak saya kira cukup pak ya.
- Informan : Bawahnya yang mendukung 2 sektor
- Penulis : 2 sektor itu.
- Informan : Dari sisi wisata dari sarana dan prasarananya, pendidikan ya kita kembangkan model-model pendidikan yang bertaraf internasional
- Penulis : Saya kira cukup ya pa, nanti saya coba kembangkan.
- Informan : Nanti ada tambahan apa kita bicarakan, kalau gak bisa nanti tanya Pak Kabid juga
- Penulis : Nanti saya coba kembangkan informasi yang saya dapat dari bapak...matur nuwun ya pak.

Yogyakarta, 29 Oktober 2008

**Script wawancara dengan Dra. Erni Februarita, M.Si  
(Staf Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan )**

---

Penulis : Bu, program perencanaan kebijakan pendidikan inklusi kalau saya lihat berdasarkan Tupoksi, itu tidak salah adalah *job* Ekososbud, karena persolan yang berkaitan dengan pendidikan merupakan tugas dari Ekososbud , namun mengapa dalam pelaksanaannya *dihandle/tangani* oleh Litbang?

Informan : Biasanya begitu, kalau ada pekerjaan yang susah sering dilempar ke Litbang. Kita disini seperti tempat sampah. Namun bagaimanapun, Fendy bertanya benar mengapa program pendidikan inklusi di tangi oleh Litbang sementara itu Tupoksinya Ekososbud!

Yogyakarta, 07 Mei 2010

**Script wawancara dengan Pak. Affrio Sunarno, S.Sos  
(Staf Sub Bid Litbang ) dan  
Pak. Muslim, S.Pt (Staf Sub Bid Data)**

---

Penulis : Setelah saya mulai nyusun KTI ternyata ada beberapa keterangan yang saya butuhkan, kemarin sudah ada penjelasan dari Pak. Djanjang tentang pembagian kerja bahwa Bappeda memiliki struktur organisasi, dan setiap satuan unit sudah diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas seperti di Perwal itu kan, ah yang ingin saya fokuskan itu adalah bagaimana sebuah kegiatan itu, katakanlah kemarin itu disini isu tentang pendidikan inklusi yang diangkat menjadi kegiatan dari Litbang ya pak ya, itu bagaimana sampai isu itu ditangkap menjadi program kegiatan di Sub Bidang Litbang

Informan 1 : Okay, nanti juga data ya karena kebetulan Litbang sama data sekarang terpisah data di sana Litbang di sini, ya jadi dulu kan satu bidang sekarang jadi dua bidang, bidang data sendiri bidang Litbang sendiri, nanti biar Data Mas Muslim yang cerita, mas Muslim tetap di data saya di Litbang jadi begini yang pertama kita sudah punya Tupoksi itu urainnya sudah jelas. Kita boleh melakukan apa saja, nah ketika kita hendak melakukan apa saja itu ada, ada, ada kebutuhan untuk melihat masalah, masalahnya ada di luar di masyarakat misalnya iya kan, jadi a... yang dipertimbangkan disatu sisi adalah Tupoksi yang kedua adalah masalah di masyarakat, masalah itu banyak salah satunya misalnya berita di koran, bisa juga hasil a...hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat keluarahan ya mas ya, Musrenbang itu, trus bisa juga itu masukan langsung misalnya dari SMS dan unit pelayanan informasi dan keluhan di situ ada masalah di sini ada Tupoksi. Masalah itu harus diselesaikan oleh siapa pertanyaanyakan begitu, o masalah ini yang lebih cocok yang punya tugas pokok dan fungsi ini masuk menjadi Litbang misalnya. Contoh misalnya di wilayah selatan itukan ada perkembangannya lambat kota Jogjakan lambat, kita mencoba untuk menata di sana, kemudian Litbang mengambil misalnya okay kalau begitu dibutuhkan ada bangkitan ekonomi. Bangkitan kegiatan usaha. Bangkitan itu ada titik pertumbuhan itu apa. Berarti kita akan tidak bisa pakai punya masyarakat harus punya Pemda iya kan, ada pasar, pasarnya kita e....lebih optimal misalnya pasar Ngasem kita pindahkan ke jalan Bantul. Nah kita membuat titik pertumbuhan di sanan untuk memacu wilayah selatan berkembang, nah karena untuk masuk kesana itu dibutuhkan perencanaan dulu, maka kita Litbang melakukan semacam a...survai *fisibillity study*, iya to *fisibillity study*, kemudian kita petakan iya kan gini-gini-gini,

disanan to yang cocok kegiatan yang sifatnya seperti ini, sehingga keputusannya bersamaan dengan itu pasar Ngasem kita pindah karena disitu tidak tidak tidak cocok lagi dengan muatan sebagai daerah tujuan wisata, kawasan wisata iya kan ujung benteng kan gitu. Burung itu sudah tidak cocok, orang tidak lihat burung sekrang, orang awamnya beli, tetapi yang beli tidak mungkin wisatawan manca dan tidak mungkin orang luar daerah. Yang berwisata ke sini hanya kusus beli burung ya ada, tapi mereka tidak melihat tujuan wisata yang lain, tetapi kalau orang yang melihat tujuan wisata lain, gak akan beli burung disitu, percuma dijalan mati nanti malahan, kan gitu tidak cocok itu yang kita pindahkan ke selatan. Pasar Ngasemnya dicocokkan dengan tema wisata sehingga menjadi pasar kuliner dan sovenir kan gitu. Ini kan kita yang membuat *fisibillity study* jadi cara untuk membuat sesuatu proyek atau kegiatan menggabungkan adanya permasalahan dengan kecocokkan tugas pokok.

Penulis : Berarti kegiatan itu diambil dari isu yang berkembang di masyarakat atau masukan-masukan dari beberapa media tadi

Informan 1 : Yang penting itu masalah, masalah bisa sumbernya koran, bisa sumbernya SMS, bisa sumbernya UPIK bisa sumbernya dari dewan atau dari Musrenbang atau dari penjangingan aspirasi masyarakat. Cara masuknya informasikan macam-macam tetapi kan yang kita lihat itu masalah

Penulis : Berarti setelah. Gimana ya langkah awalnya jadi kan tadi melakukan *fisibillity study* atau semacam penelitian gitu ya pak. Ingin melihat keadaan disitukan, itu yang turun kesana itu Litbang, ya, yang melakukan itu karena sebelumnya isu sudah ditangkap bahwa itu Tupoksinya Litbang.

Informan 1 : Karena ada isu seperti itu ini harusnya gimana, kalau isu toh kira nantinya gak bisa maka kita harus memastikan isu itu dulu, cara memastikan dengan malukan *fisibillity study*

Penulis : Jadi seperti itu pengambilan sebuah isu yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah program kegiatan. Trus ini ada lagi pak Mus ini kan saya baca di Perwal 190 dan 61 tentang perincian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan unit kerja itu dibagian ketentuan penutup itu dikatakan bahwa pembagian tugas masing-masing organisasi dilingkungan Bappeda diatur lebih lanjut oleh kepala Badan jadi, maksudnya kan sudah ada Perwal tetapi kemudian di bawahnya sudah diatur oleh Kepala Bappeda.

Informan 2 : Artinya sebagai kepala unit kerjapun dia juga mungkin masih bisa membagi lagi berdasarkan tingkat prioritas meskipun sudah ada kamarnya oleh kalau ada Tupoksi ini ini bidang ada, namun tidak menutup kemungkinan ada kegiatan yang sifatnya juga apa artinya bisa dua-duanya mengkait, jadi kegiatan seperti ini yang kebijakn kepala bappeda melimpakah kapan itu diarahkan ke bidang A apa B cara membaca kegiatan itu yang mau didisposisikan harus kita

liat, ow jadi ternyata ada juga kegiatan yang dua sebnarnya dua-duanya mengkait

- Penulis : Kalau untuk pendidikan inklusi sendiri itu dibentuk semacam tim atau memang murni ditangani oleh Litbang sendiri, tim maksud saya secara internal Bappeda sendiri ditangani oleh Litbang sendiri atau digabungkan sama sub bidang lain misalnya Eksosbud masuk
- Informan 1 : O, jadi gini-gini jadi kita melihanya dengan cara begini, e,,ditangani Litbang itu artinya yang mengelola anggarannya Litbang itu, tetapi kalau yang mengelola anggaran Litbang itu berarti nanti misalnya penyelenggaraanya rapat harus kita inisiatif kita yang membuat undangan dan sebagainya kita, tetapi orang yang terlibat sesuai kompetensi, misalnya tadi soal *fisibility*, soal pendidikan inklusi yang kebetulan tau ya okey kita tidak bisa ngomong inklusi tanpa Dinas Pendidikan kita libatkan sebagai tim, kita tidak bisa ngomong inklusi kalau kita tidak libatkan Dinas Bangunan, karena nanti ngomong inklusi pasti ada perubahan kebutuhan untuk bangunannya, tidak bisa ngomong itu tanpa ngomong dengan badan kepegawaian-kan ada penyesuaian dengan gurunya kan gitu. Jadi kita sudah tau kalau masalahnya ini maka metodenya maka yang stake holder yang terkait kita libatkan supaya paradigmanya komprehensif.
- Penulis : Saya coba konfirmasi kembali, jadi memang secara administrasi dan prosesnya di koordinir oleh Litbang gitu ya tapi kemuidain melibatkan stakeholder lain, gitu ya pak ya
- Informan 2 : Iya harus supaya komprehensif dan jadinya tidak setengah-setengah, karena mungkin ada dari SKPD yang spesifik-spesifik kita juga masalah teknis-teknis, kita juga menghargai mereka sebagi fungsi teknis dan pemikirannya lebih terfokus disana sementara bappeda tugasnya mengemetskan saja. Mau tidak mau harus kita rangkul, tidak seblah-sebelah kita tinggalkan, kita tinggalkan nanti trus apa jadinya kalau kita tidak timbulkan kita hadirkan jangan-jangan nanti jadi salah.
- Penulis : Terus saya kan sempat membaca Renstra SKPD Bappeda, 5 tahun ya jangka waktunya jadi 2007-2011?
- Informan 2 : Iya, Renstra itu... hanya namanya dulu ya itu dulu namanya Rensda, tapi seblum ada...Permendagri 13 apa ya mas ya mas undang-undang tetang apa ya perencanaanya, itu sekarang jadi RPJM.
- Informan 1 : Kalau instansi tetap namanya Renstra tapi kalau daerah berubah, dulu Renstra Daerah sekrang RPJM. Itu di Undang-undang no 25 tentang perencanaan nasional.
- Penulis : Kalau daerah tadi apa namanya?
- Informan 2 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kalau yang dulu Renstra sekarang menjadi RPJM
- Penulis : Nah itu kan, kalau yang Renstra SKPD instansi itu kan jangka waktunya 5 tahun, trus saya lihat di dalam itu kan ada terdapat

beberapa program dari setiap unit yang di *breakdown* ke dalam beberapa kegiatan, seperti contoh di Ekososbud misalkan, itu kalau saya tidak salah ada 7 kegiatan. kemudian ada kegiatan yang murni ditangani sendiri dan ada kegiatan yang ditangani bersama dengan bidang lain

Informan 2 : Jadi lintas ya

Penulis : Iya lintas, itu kan ada 7 kegiatan, apakah 7 kegiatan itu dikerjakan selama 5 tahun itu atau sifatnya fleksibel dalam artian sebentar atau nanti ada penambahan gitu

Informan 2 : 7 itu kan suatu target ya. Artinya target itu kapan dicapai ya terserah skala prioritas atau gimana, ya mungkin dari 7 pokok ini harus dikerjakan selama 5 tahun ya katakanlah tahun ini ini bari sampai target yang ke 4 kita kerjakan gak masalah nanti akhirnya akumulasi, namun itu merupakan suatu target jadi ada akumulasi. Jadi katakanlah sekarang dalam bidang apa kita mau bicara tentang kegiatan apa, tentang isu faktual yang terjadi di tahun ini dirangkum dalam 7 kegiatan tadi, ow ini yang kita ambil, sementara ini jadi kita kerjakan seperti ini, jadi merupakan suatu prioritas. Itu ujung-ujungnya 5 tahun harus tercapai, karena itu merupakan target bundel satu ikatan target 7 kegiatan tadi harus tercapai.

Penulis : Kalau Jarlit itu suatu ini juga ya salah satu apa namanya...cara jalur yang dipakai untuk menjaring permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat ya

Informan 2 : Kebetulan kegiatannya ada yang sifatnya memberikan kesempatan kepada warga sumbangsi dalam penelitian

Informan 2 : Jadi kita ada dana hibah, jadi dibuat proposal..

Informan 1 : Nanti temanya ditentukan dari sini

Informan 2 : Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Penulis : Paradigma pembangunan sekarang sudah berubah atau terbalik ya. Dulu kan *top down*

Informan 2 : Sekarang kan dijaring dari bawah, pergerakan permasalahan dari bawah

Penulis : *Bottom up*-kan. Dulu era Orde Baru di atas aja yang membuat kebijakan

Informan 2 : Ada juga yang dari bawah, tapi porsi nya masih kecil atau sedikit, sekarang kesempatan buat warga biar *matches*...jadi tidak dari atas terus.

Penulis : Bisa artikan bagini gak ya pembagian tugas atau pelimpahan wewenang dalam menangani kegiatan-kegiatan itu, itu yang kemudian tertuang dalam Renstra itu itu bersumber dari setiap bidang ya?

Informan 1 : Iya dan bidangnya mengambilnya dari ini sama dari adanya Musrenbang, dari UPIK...

Penulis : Kalau pak Bas ada ya?

Informan 2 : Ada.

Penulis : Saya ada mau menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Ekosobud. Saya mau tanyakan mengenai volume kerja. Saya coba ketemu sama bliu dulu.

**Keterangan**

Informan 1: Pak. Affrio Sunarno, S.Sos

Informan 2: Pak. Muslim, S.Pt

